



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan nonformal atau yang biasa disebut dengan jalur pendidikan luar sekolah memiliki peranan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang karena faktor usia, waktu (kesempatan) dan sosial ekonomi yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah.

Pendidikan merupakan sektor penting yang berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan bangsa. Apabila melihat kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan terutama untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah. Mahalnya biaya pendidikan menjadi faktor utama bagi masyarakat sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan bahkan sampai sekolah dasar sekalipun. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan mengakibatkan semakin meningkatnya angka kemiskinan dan kebodohan. Tidak jarang masyarakat yang mengalami buta huruf sebagai konsekuensi dari kurangnya pendidikan bagi mereka. Untuk mengurangi masalah tersebut perlu adanya layanan pendidikan yang dapat menyentuh masyarakat hingga lapisan bawah, dimana pendidikan tidak hanya memusatkan pada jalur pendidikan formal

saja, melainkan melalui jalur pendidikan lain yaitu pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Luar Sekolah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mungkin terlayani pendidikannya di jalur pendidikan formal. Program yang diselenggarakan dalam Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi PAUD, Program kesetaraan Pendidikan Dasar Luar Sekolah, Program Pemberantasan Buta Huruf melalui Keaksaraan Fungsional, Program Taman Bacaan Masyarakat, Program Pendidikan Perempuan, Program Pendidikan Berkelanjutan, Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola program PLS dari, oleh dan untuk masyarakat.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan program pendidikan di jalur Pendidikan Luar Sekolah adalah terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat daerah yang dikelola oleh lembaga kemasyarakatan daerah setempat. PKBM merupakan salah satu ujung tombak pengembangan program PLSP di tingkat lapangan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dari sinilah diharapkan pengelola PKBM mampu mengembangkan dirinya secara maksimal dalam melayani dan mengembangkan program pemberdayaan di masyarakat (Sihombing, 2001:23).

PKBM merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran bahwa dengan melembagakan PKBM akan banyak potensi yang selama ini tidak tergalikan

dapat digali, ditumbuhkan, dimanfaatkan dan didayagunakan. PKBM hendaknya menjadi pemicu dan penyulut motivasi dan kreasi masyarakat.

Dalam pandangan Pendidikan Luar Sekolah semua orang yang secara potensial merupakan peserta didik (warga negara) dalam berbagai tahap dalam perkembangan hidupnya, karena itu peserta didik yang menjadi sasaran pendidikan luar sekolah sangat luas dan bervariasi. Studi kasus yang telah dilakukan terhadap program pendidikan non formal menunjukkan bahwa secara potensial sasaran populasi pendidikan non formal meliputi:

1. Semua anggota masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan formal di sekolah.
2. Semua anggota masyarakat yang karena satu dan lain hal tidak dapat menyelesaikan studi pada tingkat pendidikan tertentu secara bulat, golongan ini dikenal dengan anak gagal atau drop out.
3. Anggota masyarakat yang meskipun telah menyelesaikan studi pada tingkat pendidikan tertentu (formal) masih menganggap perlu untuk mendapatkan pendidikan melalui program pendidikan non formal (Nana Sudjana, 1991: 211).

Haruslah disadari bersama bahwa jalur pendidikan luar sekolah juga mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam rangka mendukung keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun. Karena itu jalur pendidikan luar sekolah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang setara

dengan jenjang pendidikan SMP yang diberi nama Program Paket B (Hari Setiadi, 1999: 26-27).

Sasaran yang lebih spesifik menurut Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga Nomor KEP-105/E/L/1990 Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa sasaran program pendidikan luar sekolah pada umumnya adalah warga masyarakat terutama yang tergolong miskin dalam pendidikan yaitu mereka yang berbagai alasan:

1. Tidak pernah mendapatkan pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah;
2. Tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti program pendidikan melalui lembaga persekolahan;
3. Tidak dapat menyelesaikan pendidikannya pada jenjang persekolahan tertentu secara keseluruhan (yang dikenal sebagai anak putus sekolah dalam jenjang);
4. Berhenti pada akhir suatu jenjang persekolahan sebelum memiliki STTB atau Ijazah (yang dikenal sebagai anak putus sekolah di ujung jenjang).
5. Berhenti pada akhir suatu jenjang persekolahan walaupun berhasil lulus dalam evaluasi belajar tahap akhir (yang dikenal sebagai anak putus sekolah antar jenjang) (Depdikbud, 1990: 12);

Sesuai dengan sasaran program di atas, maka misi dan proses pendidikan lebih ditekankan pada: (a) pengetahuan yang dapat diterapkan dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari (informasi fungsional); (b) keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk mencari nafkah sehari-hari atau untuk

meningkatkan mutu dan taraf hidup (keterampilan yang relevan); serta (c) pengarahan sikap mental ke arah pembaharuan dan pembangunan.

Kelompok belajar Paket B diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan sekolah menengah pertama dan memiliki peran dalam mendukung wajib belajar pendidikan dasar setara SMP (Wajar Dikdas 9 Tahun). Sasarannya adalah siswa lulusan SD/MI sederajat yang tidak melanjutkan ke SMP dan siswa DO SMP usia 13-15 tahun.

Dilihat dari segi kuantitas program dapat memperlihatkan hasil berdasarkan jumlah warga belajar yang mengikuti program belajar di kelompok belajar (Kejar). Sementara hasil belajar secara kualitatif yang berkaitan dengan mutu hasil belajar dan relevansinya dengan tuntutan dunia kerja belum pernah mendapat perhatian yang semestinya. Pendidikan masyarakat belum mampu meyakinkan warga sasarannya tentang arti pentingnya pendidikan sehingga masyarakat belum merasa bahwa pendidikan itu menjadi kebutuhan mutlak dalam kehidupannya. Hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan luar sekolah adalah bahwa program pembelajaran masyarakat yang terencana dan terprogram sulit untuk ditelusuri keberadaannya sehingga keberhasilan secara kuantitatif juga sukar untuk dipertanggungjawabkan.

Program pendidikan masyarakat belum menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi berorientasi pada anggaran yang disediakan pemerintah sehingga setelah habis tahun anggaran, habis pula program pembelajarannya. Program dan pelaksanaannya tidak melembaga di masyarakat sehingga sukar

mengikuti hasil dan dampak pelaksanaan program, baik terhadap warga belajar maupun lingkungan tempat program dilaksanakan.

Problematika tingginya angka putus sekolah di Desa Padengo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato tidak hanya ditunjukkan oleh banyaknya angka putus sekolah, akan tetapi sulitnya akses pendidikan karena letak geografis bergunung juga menjadi sebuah polemik tersendiri. Disamping itu faktor minat peserta didik untuk mengikuti pendidikan baik formal dan pengaruh lingkungan masyarakat merupakan variabel yang turut memberikan kontribusi tingginya anak putus sekolah di Desa Padengo. Kondisi yang menjadi masalah lain adalah sebagian warga masyarakat kurang -memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Sesuai dengan data hasil pengamatan penulis bahwa jumlah warga belajar paket B di Desa Padengo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato yang terdaftar dan mengikuti kegiatan pembelajaran adalah 75 orang yang terbagi dari tiga kelompok belajar, masing-masing kelompok mempunyai tutor sebanyak 7 orang. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat penyelenggaraan program paket B, yang pada umumnya sebagian kelompok hanya menggunakan fasilitas di SD setempat.

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka peneliti berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana Penyelenggaraan Program Paket B di PKBM Tirta Kencana Desa Padengo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Deskripsi Implementasi Prinsip Pendidikan Non Formal Dalam Penyelenggaraan Program Paket B Di PKBM Tirta Kencana Desa Padengo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan implementasi prinsip pendidikan non formal dalam penyelenggaraan Program Paket B di PKBM Tirta Kencana Desa Padengo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan pendidikan, khususnya tentang penyelenggaraan Paket B, dan prestasi yang dicapai oleh warga belajar dalam proses kegiatan pembelajaran
- 2) Mengembangkan potensi untuk penulisan karya ilmiah, khususnya bagi pribadi peneliti maupun kalangan akademisi, dalam memberikan informasi kepada dunia pendidikan khususnya tentang penyelenggaraan Paket B.

2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap Deskripsi Implementasi penyelenggaraan Paket B di PKBM Tirta Kencana Desa Padengo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan motivasi, serta berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya khususnya menyangkut penyelenggaraan Paket B.